HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN MATA KULIA LAINNYA DI FAKULTAS HUKUM

VICY FARENTIA

EMAIL : vicyfarentia0402@gmail.com

No BP : 2010003600324

UNIVERSITA EKASAKTI PADANG

A. PENDAHULUAN

Ilmu tidak dapat di pisah-pisahkan dalam kotak yang terpaku mati.olehkarena itu tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri tanpa adanya pengaruhi dan hubungan .ilmu negara adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umumnya harus berkerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya . hal ini terutama nampak jelas dengan hubungan khusus antara ilmu negara dengan ilmu politik,ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan hukum tata negara.

B. PEMBAHASAN

1.pengertian ilmu negara

Ilmu Negara adalah **Georg Jellinek** sebagai mana dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Staatslehre* (ilmu negara umum). Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya . ilmu negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum dalam suatu negara tertentu. Maka ilmu negara bernilai teoritis.

Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian dan sendi pada pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada didunia ini, misalnya tentang kejadian negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, dll. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai *genus* (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari suatu negara. Ilmu Negara tidak

membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal tersebut dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis.

M. Solly Lubis, SH, dalam bukunya *Ilmu Negara* menyatakan bahwa Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan dan jenis-jenisnya. Obyek ilmu alam abstrak dan umum, bahkan tidak terikat ruang, tempat, waktu.

B. Hubungan secara Umum

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kota yang terpaku mati. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lain tanpa pengaruh dan hubungan. Dalam hal ini, ilmu negara sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial hubungan dengan ilmu hukum, ekonomi, kebudayaan, psikologi, dan lain sebagainya, merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya.

Oleh karena itu, ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan umum, harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling membutuhkan, sehingga dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga hubungan terwujud komplementer.

C. Hubungan Secara Khusus

1. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Kalau memperhatikan pendapat Georg Jellinek dalam bukunya "*ALgemeine Staatslehre*", ilmu Negara sebagai *theoretische staatswissenschaft* atau *staatslehre* merupakan hasil penyelidikan dari *staten kunde*. Bahan-bahan tersebut di bahas, dianalisis, dan di perbandingkan satu sama lain, sehingga terdapat persamaan-persamaan diantara berbagai sifat dari organisasi-organisasi negara itu.

Dari fakta yang bermacam-macam itu di cari sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan "pembagi persekutuan terbesar" dalam ilmu hitung atau *grootste gemene deeler* -nya dari keadaan yang berbeda-beda itu .dan jika pekerjaan tersebut dilaksanakan atau diterapkan di dalam peraktek untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada *angewandte staatswissenschaft* atau ilmu politik.

Maka dalam hubungan ini jelaslah ada sifat-sifat komplementer. Karena itu, ilmu negara merupakan salah satu *bardcore* (teras inti) dari ilmu politik.

2. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Hukum Administrasi negara

Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara memiliki hubungan yang erat dengan ilmu negara karena ilmu tersebut mempunyai obyek yang sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Perbedaan ilmu hukum tata Negara dan ilmu hukum negara memandang negara dari pandangnya atau pengertiannya yang konkrit. Obyek dari ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai ajektif tertentu, misalnya Negara Republik Indonesia.

Kemudian negara dalam pengertiannya yang konkrit di selidiki lebih lanjut mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya, berwenang, dan kewajiban alat-alat perlengkapannya. Kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut adalah hukum positif, dan di dalam sistematika Georg Jellinek, kedua cabang ilmu tersebut termasuk dalam kategori *rechtswissenschaft*.

Antara ilmu hukum tata Negara dan ilmu hukum administrasi negara terdapat hubungan yang sangat erat pula. Bahkan di negeri belanda, dua lapangan hukum tersebut pernah disebut bersama-sama, yaitu *staats en administratief recbt*, bahkan selalu di ajarkan oleh seorang guru besar. Meskipun demikian, kejadian tersebut berarti bahwa kedua cabang imu tersebut adalah sama.

Oppenheimer menyebutkan bahwa peraturan-peraturan hukum tata negara adalah peraturan mengenai keadaan dalam keadaan *karat* (Negara yang sedang beristirahat, atau negara dalam keadaan tak bergerak). Malah, mengenai peraturan-peraturan hukum administrasi negara adalah peraturan mengenai de staat di beweging atau negara yang sedang bergerak. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, maka ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi Negara sudah jelas lapangan penyelidikannya hanya terdapat Negara-negara tertentu (hukum positif), sedangkan ilmi negara tidak mengenai Negara-negara tertentu, melainkan negara-negara di dunia ini pada umumnya .

Kranenburg dalam bukunya “ALgemene Staatsleer” menguraikan bahwa bagi orang yang mempelajari hukum tata negara positif Negeri Belanda, pengetahuan teori negara umum atau ilmu negara sangat perlu. Akan tetapi, mengingat tingkat ilmu pengetahuan sekarang, serta melihat organisasi perguruan tinggi hukum yang sekarang ada untuk sebagian besar di tentukan oleh kebutuhan-kebutuhan praktik yang segera, maka pengetahuan teoretis untuk kebanyakan ahli hukum hanya terbatas kepada apa yang mereka menerapkan sebagai pengantar hukum tata Negara positif.

Maka dengan demikian,, bahwa, bahwa ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-
pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-

pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-pengertian-dasar-pokok-negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan dan administrasi negara sesuatu negara tertentu, sudah sewajarnya kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ikhwalnya secara umum tentang negara yang di dapat dalam ilmu Negara.

3. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara

Ilmu perbandingan tata negara ini di kenal dengan sebutan *vergelijkende staatsrechtswetenschap* atau *pemerintah pembeding*, dan M. Nasroen menamakannya “Ilmu Perbandingan Pemerintahan”, judul bukunya.

Kerananburg menyatakan bahwa dari ilmu pengetahuan dan diferensiasi itu, hasilkan ilmu perbandingan tata negara. Maka yang menjadi obyek penyelidikan ilmu perbandingan hukum tata negara adalah bahwa: dalam peninjauan lebih lanjut, mungkin dapat memanfaatkan perbandingan secara metodelis dan sistematis terhadap ”bentuk” yang bermacam-macam dari sifat-sifat dan ketentuan-ketentuan umum dari *genus* ” negara”. Dan sekali lagi, jikalau penyelidikan itu berkembang dapatlah di capai suatu tingkatan tingkatan yang menghendaki penyelidikan dan kumpulan-kumpulan yang terverifikasi di satu kesatuan yang baru sekali .

Jadi jelaslah, bahwa ilmu hukum perbandingan tata Negara secara teratur, secara sistematis, sifat-sifat yang melekat padanya, sebab-sebab apa yang menimbulkannya mengubah dan menghilangkan atau menyebabkan satu bentuk yang membentuk suatu bentuk negara itu.

Maka dalam hubungan ini, Kerananburg menyatakan bahwa dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tata itu haruslah mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara. Karena itu, perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tubuhnya ilmu perbandingan ilmu perbandingan untuk menjadi ilmu yang anggota tata negara perbandingan.

4. Rangkaian Hubungan antara Ilmu Negara, Ilmu Politik, Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara

Sjachran Basah mengemukakan tentang rangkaian hubungan antara ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan tata negara. Ilmu negara yang bersifat teoretis dan umum itu dalam penyelidikan terhadap obyeknya lebih menitikberatkan kepada bangunan-bangunan atau lembaga-lembaga formal yang di batasi oleh hukum yang berlaku. Ilmu politik dalam penyelidikannya lebih menitikberatkan pada gejala sosio-politik dalam masyarakat sebagai gelanggang pertarungan faktor kekuasaan yang nyata, dan memperhatikan pula

bagaimanakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga tersebut di dalam peraktek kenyataanya, maka sifat ilmu politik dinamis dinamis

Factor teoretis umum dan faktor peraktis dinamis itu saling melengkapi satu sama lain, saling membutuhkan dan melengkapi untuk menjadi dasar bahan-bahan yang akan diterapkan oleh ilmu hukum tata Negara dalam obyek penyelidikannya terhadap "satu" Negara tertentu, untuk mengikuti "dapatlah di capai tujuan- tujaun sosial yang di kejar Negara ". Hal itu senada dengan istilah hans kelsen: *politik als ethik* dan "upaya" alat-alat apa saja kah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ", atau menerapkan istilah pengertian hans kelsen *politik als technik* .

Hal-hal tersebut di atas sebagai kebutuhan bahan-bahan lebih lanjut dalam proses perkembangan dan diferensiasinya oleh ilmu perbandingan hkum tata negara. Tujuannya untuk menyelidiki berdasarkan perbandingan yang akan memberikan pengetahuan lebih banyak jika di tinjau secara berdampingan terhadap bermacam-macam bentuk negara dan pemerintahan atau beranekaragam badan-badan perlengkapan kenegaraan, sebagai bagian tertentu dari suatu sistem yang digunakan pemerintahan untuk mencapai wujud yang sama dengan demikian , dari penggambaran dan keterangan itu akan di hasilkan oleh suatu nilai, yaitu apakah yang di wujudkan dengan kesadaran bernegara itu keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk sebagian tertentu aatu beberapa golongan saja, atau kah untuk seluruh rakyat ?.

Bahwa ilmu politik akan melakukan penyelidikan lapangan, justru memang pada rangka yang bersifat umum hukum, atau bahwa ilmu politik tidak akan merupakan suatau ilmu tentang negara-negara. Hal ini berarti mempertahankan istilah "ilmu politik" dari herman heller yang mengemukakan dengan tepat bahwa batas-batas pokok antara ilmu negara dengan ilmu politik lebih ketajaman dari perbedaannya dalam peraktek, sehingga yang pertama untuk sebagian terbesar di tuntutan oleh para ahli hukum, dan yang penghabisan oleh ahli sosiologi.

D. Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Negara

Pertumbuhan dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan pada anak-anak bebas untuk berfikir dan menyatakan hasil berfikir dari manusia itu. Karena itu jika ada kebebasan menyatakan pendapat yang merupakan hasil dari pemikiran kemasyarakatan yang luas, maka harus ada hal-hal yang menyebabkan sehingga di lakukan penyelidikan. Biasanya ada keadaan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat itu. Demikianlah ilmu itu tumbuh dan berkembang. Karena itu dikatakan bahwa ilmu adalah lambang yang utama dari sebuah kemajuan.

Ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu kenegaraan, di dalam prosesnya sebagai ilmu itu, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini akan melihat kepada ilmu induknya, yaitu ilmu kenegaraan, dengan para pemikirnya.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, ilmu negara mengalami berbagai macam tingkatan. Sjachran Basah membagi jenis besaran pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan itu sebagai berikut:

1. Masa Yunani Purba

Dalam masa itu, terdapat beberapa filsuf, yakni:

Sebuah. Socrates (470-399 SM)

Meskipun socrates tidak membentuk suatu sistem ajaran dan tidak pula meninggalkan buku-buku, namun tetap segar dan akan tetap tergores dalam ingatan, beberapa prinsip dan ajarannya itu lewat jasa muridnya, Plato.

Cara bekerja Socrates yaitu dengan metode dialektis atau "Tanya jawab" (dialog) dengan mencoba mencari pengertian tertentu, yaitu mencari dasar-dasar hukum dan keadilan "yang sejati bersifat obyektif dan dapat dijalankan serta diterapkan kepada setiap manusia".

Menurut pendapatnya, di setiap hati kecil manusia terdapat rasa hukum dan keadilan yang sejati, yang menyebabkan bergemanya detak-detak kesucian, karena setiap insan itu merupakan sebagian dari Nur Tuhan Yang Maha Pemurah, adil, dan penuh kasih. Meskipun detak-detak kesucian itu dapat terselubung dan kabut kabut tebal kemilikan dan ketamakan, kejahatan dan keanekaragaman kezaliman, namun tetap ada dan tidak dapat dihilangkan laksana cahaya abadi.

Landasan organisasi yang dibuat oleh manusia demi kepentingan dirinya, melainkan negara itu suatu susunan yang obyektif berdasarkan sifat hakikat manusia, karena itu benar-benar untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang obyektif, termuat "keadilan bagi umum", dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa yang saling berganti-ganti orangnya.

Maka keadaan sejatilah yang harus menjadi dasar baru Negara. Jika hal tersebut dilaksanakan dan diterapkan, maka manusia merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwanya, sebab kebatilan hanya membawa kesenangan yang palsu.

b. Plato (429-347 SM)

Plato ajaran Socrates. Dimulainya dengan ajarantunggalnya *politeia*, dengan mana digambarkannya *ideale staat* atau Negara ideal (sempurna), karena itu sifatnya disebut "*ideenler van Plato*" atau ajaran cita plato yang terkenal serta tersohor sampai zaman sekarang ini, yang biasa disebut "idealisme".

Menurut ajaran itu dikenal adanya dua dunia, yaitu:

1. Dunia cita yang bersifat immaterii

Yaitu ide tau kebenaran sejati yang bersemayam di alam terhubung, yaitu di alam cita yang berada di luar "dunia palsu"

2. Dunia alam yang bersifat material

Yaitu dunia fana yang bersifat palsu.

Sehubung dengan cita-cita dunia tersebut, maka terdapat tiga jenis cita-cita mutlak, yaitu:

- o Cita kebenaran (logika)
- o Cita keindahan (estetika)
- o Cita kesusilaan (etika)

Cita ketiga tersebut merupakan baru bagi tingkah laku manusia, kerana ternyata, bahwa manusia itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:

- o Pikiran demi kebenaran
- o Rasa demi mencari keindahan
- o Kemauan demi mencari kesusilaan

Maka, hubungan antara kedua dunia itu (dunia cita dan dunia alam) adalah:

1. Dunia cita:

- o Cita kebenaran
- o Cita keindahan
- o Cita kesusilaan

2. Dunia alam:

- o Pikiran
- o Rasa
- o Kemampuan

Menurut plato, negara harus masuk dan merupakan kesatuan, karena suatu keluarga yang besar. Maka luas suatu negara yang diukur, dan memungkinkan negara tersebut dapat menerimanya. Karena itu, negara tidak boleh mempunyai daerah yang luasnya tidak tertentu.

Negara yang ada di dunia ini sifatnya tidak sempurna karena merupakan bayangan belaka dari negara yang sempurna, yang ada di dalam dunia cita itu. Tujuan negara adalah untuk mencapai, memproyeksikan, dan melihat cita yang sebenarnya. Masyarakat baru berbahagia bilamana pengetahuannya tidak terbatas kepada bayangan saja, tapi juga mengenal yang sebenarnya.

Mengenai negara yang sempurna dan baik itu yang bersifat ideal etis diperlukan beberapa syarat:

1. Negara harus dijalankan oleh pegawai yang terdiri khusus
2. Pemerintah pelayanan segala-galanya kepentingan umum
3. Harus dicapai kesempurnaan susila dari rakyat

Adapun tiga kelas dalam negara idealistis yaitu;

1. Penguasa atau para penguasa
2. Para wali atau para pengawal negara
3. Pengrajin atau pekerja

c. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles melanjutkan pikiran idealisme Plato ke realisme, Oleh karena itu filosofi aristoteles adalah ajaran tentang fakta atau ontologi, yaitu suatu cara berfikir yang realistis. Sehingga dengan demikian, metode menyelidikikannya bersifat induktif empiris. Dan karena itu pula, ia di juluki bapak ilmu pengetahuan.

Jika plato membagi dunia menjadi dua bagian, maka aristoteles tidak mengakui perbedaan dua dunia ini. Ia hanya mengakui adanya satu dunia yang mempunyai proses. Jadi, aristoteles tidak membedakan cita dunia dan dunia, tetapi pikirannya langsung berbicara kepada pihak yang sebenarnya melalui pancaindera.

d. Epicurus (342-271 S.M)

Pendapatnya menyimpang dari pendapat umum yang ada di Yunani ada waktu itu. Sebab, menurut pendapatnya, masyarakat itu ada karena adanya kepentingan manusia sehingga yang krisis berita masyarakatnya sebagai satu kesatuan, tetapi manusia-manusia itu yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

e. Zeno (300 SM)

Pahamnya mengenai kenegaraan didasarkan pada sifat kosmopolitis, yang tidak mengenal perasaan kebangsaan, sehingga negara tidak usah berdasarkan perasaan kebangsaan yang merupakan perasaan yang bersifat sentimen dan kolot. Dan karena setiap orang yang sehat, maka haruslah diusahakan suatu negara yang mencakup seluruh dunia atau negara yang merupakan negara dunia.

Meskipun demikian orang tidak perlu mencintai negara, tetapi cukup dengan mencintai dan menaati undang-undang, sebab syarat "cinta" kepada negara merupakan syarat yang terberat bagi para warganya. Paham Zeno tersebut tidak terbatas pada polis seperti pada Plato dan Aristoteles serta Sokrates, melainkan bersifat negara dunia sehingga terdapat universalisme yang mencakup seluruh manusia, dan mengenai batin yang merupakan budi dari manusia itu.

f. Polybios

Polybios sangat terkenal dengan teori perkembangan dan kemerosotan atas bentuk-bentuk pemerintahan dengan memperhatikan faktor-faktor psikologi tersebut, yang dinamakan teori perjalanan siklus. Artinya, diantara bentuk-bentuk pemerintahan satu sama lain ada suatu hubungan sebab akibat.

2. Masa Romawi

Terbagi atas beberapa masa yakni:

- a. Masa Kerajaan
- b. Masa republik
- c. Masa Prinsipat
- d. Masa Dominat

3. Masa Abad Pertengahan

Masa ini di pecah menjadi beberapa bagian yakni:

- a. Agustinus
- b. Thomas Aquinas (aquino)
- c. Dante Alleghieri
- d. Marsiglio di Padua (Marsilius)

4. Masa Renaissance

Zaman ini selalu dipertentangkan dengan zaman pertengahan. Tokoh-tokoh pada zaman ini antara lain adalah:

- a. Niccolo Machiavelli
- b. Jean Bodin
- c. Aliran Monarchomachen

5. Masa Hukum Kenegaraan Positif (Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran Deutsche Publisizten)

Dengan timbulnya ajaran atau paham kedaulatan negara, maka perkembangan babak selanjutnya, karena dari paham kedaulatan itu timbul adanya ilmu pengetahuan mengenai hukum kenegaraan positif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka meskipun terdapat terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmupolitik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu jelas perbandingan hukum tata negara, dan digolongkan bahwa objeknya yang sama, namun terhadap masalah-masalah yang dimiliki oleh ilmu-ilmu tersebut berlainan.

B. Saran

Penulis sadar bahwa isi makalah ini belum sempurna seperti apa yang diharapkan, makadari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing atasketidaksempurnaan makalah ini agar kedepannya bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.